

...nya miris, jika toilet umum yang ada seperti di daerah tujuan wisata tidak tersedia, atau tersedia namun tidak memenuhi standar. Jika tidak tersedia, maka masyarakat akan menggunakan sudut-sudut tertentu sebagai tempat mereka untuk membuang hajat dan buang air kecil.

Jelaslah kiranya, toilet umum, akan menentukan apakah sebuah daerah memiliki kemajuan peradaban dalam menyediakan keperluan dari masyarakat yang akan menggunakannya. Semoga saja penataan toilet umum menjadi salah satu kesadaran yang tinggi. Jika mungkin penyediaan petugasnya di test dengan keterampilan yang cukup untuk membuat toilet umum menjadi nyaman digunakan oleh publik. Selamat mencoba.

30. Koran Padang Ekspres Sabtu, 8 Desember 2018 INDUSTRI (ANTI) KORUPSI

Cukup sulit mencari padanan jenis kata yang lebih cocok untuk sektor korupsi. Apakah industri atau jasa? Jika jasa, nilai tambah yang diakibatkan sebagai sebuah transaksi 'pelayanan' yang diberikan, seperti jasa perbankan, pertahanan, atau jasa pendidikan. Ndak mungkin jasa korupsi.

Dia tidak mengolah bentuk barang, dari bahan baku menjadi bahan setengah jadi atau barang final. Dikatakan industripun korupsi ini serba janggal, karena wujudnya tidak berupa perubahan value added dari barang yang murni. Tapi tak apalah, toh yang melekat di dalamnya ada pelaku perorangan atau kelompok, yang kemudian melanggar ketentuan. Keberadaannya ada dan bak gurita menjalar ke sana ke mari.

Kendatipun korupsi itu bagian dari criminal crime, dia perlu dipisahkan dengan kelompok kejahatan dalam menemukan fakta dan mencari akar masalahnya. Korupsi baru muncul ketika perbuatan seseorang melawan hukum ketika tindakan dalam menyediakan barang publik oleh seluruh pelaku produsen maupun konsumen yang merugikan negara. Tindakan salah bilamana terjadi antara privat dengan privat tidak masuk kategori korupsi. Dia baru muncul ketika privat dengan pejabat publik dan begitu sebaliknya.

Kali ini yang menjadi menarik ketika calon Presiden Prabowo mengungkap bahwa korupsi di Indonesia sudah masuk stadium 4. Presiden Jokowi dalam kesempatan lain mengungkap tidak ada ampun terhadap koruptor. Kedua-duanya tentu masih normative 'umum' pernyataannya yang juga diulas dalam tajuk Kompas hari Kamis (6/12/2018). Seharusnya ada pernyataan yang mengungkap bagaimana memberantas akar masalah, dan bagaimana strategi inovasi lain yang mesti ditempuh agar korupsi di negara kita bisa terukur penurunannya.

Kompleksitas Segi Empat

Sebagai pengajar Ekonomi Anti Korupsi di Fakultas Ekonomi Unand, mata ajar ini berupaya meramu berbagai riset dan teori hubungan yang terjadi antara korupsi dan pembangunan. Kemudian, memperkenalkan kepada mahasiswa bentuk, fenomena dan jenis-jenis, serta masalah dan konsekuensi jika korupsi dibiarkan. Mahasiswa kami dilatih untuk terbiasa tepat waktu datang masuk ke dalam kelas, mencari masalah-masalah korupsi, dan membahasnya dalam diskusi, dan menemukan berbagai solusi. Diperkenalkan mata ajar ini kepada mereka, agar suatu saat mahasiswa selain memahami ruang lingkup korupsi, kemudian tidak mudah 'terjerat' dalam memasuki dunia nyata dengan praktik korupsi.

awal ketika mata ajar ini didesain tahun 2004, kajian korupsi oleh ekonom masih sangat terbatas. Buku yang menceritakan Mafioso dan The Economy of Crime and Punishment, dianggap sebagai sumber awal ekonom melihat fenomena ini. Tidak banyak para peneliti yang mau memasuki bidang-bidang yang berkaitan dengan korupsi, yang seolah-olah korupsi ini merupakan domain riset hukum di bidang ilmu-ilmu sosial. Sehingga pendekatan hukum yang diambil ternyata justru obat kudis ini semakin meruyak. Tetapi, belakangan kajian tentang korupsi sudah semakin meluas dan multidisiplin.

Bentuk-bentuknya, tidak saja meng-cover masalah yang berkaitan dengan ekonomi saja, akan tetapi masalah korupsi yang berkaitan dengan masalah korupsi pada sektor sosial dan politik. Terakhir yang seperti api dalam sekam, korupsi di bidang lingkungan juga akan mencuat kasus-kasusnya. Korupsipun dipetakan berpusat pada kelompok top di manajemen pemerintahan, sehingga modelnya lebih kepada segitiga terbalik. Sewaktu Presiden Marcos memerintah, banyak yang mengklasifikasikan korupsi di Filipina model itu. Model di mana para pejabat puncak yang besar dan masif melakukan tindakan korupsi. Tapi tidak mudah menemukan model segitiga terbalik, karena korupsi pejabat tinggi sering sulit mengungkapkannya.

Sebaliknya model korupsi di mana banyak pada level administrasi rendah membuat pelayanan yang mandeg pada level bawah. Jika korupsi itu ecek-ecek, maka biasa akar masalahnya jelas karena kekurangan kompensasi. Jika pelayanan sering diopor ke sana ke mari, dan kemudian selesai jika memberikan 'red tape', maka korupsi segitiga ini mudah menyelesaikannya. Sesungguhnya model korupsi yang dari bawah sampai ke top manajemen merupakan fenomena segi-empat. Ini baru menjadi sebuah industri.

Indonesia termasuk pada model ini mengingat sudah banyak penangkapan dilakukan dan berujung hampir semuanya bersalah, dan akhirnya mendekam di bui. Kepolisian, kejaksaan dan kehakiman kelompok judiciaries, yang dominan dari berbagai publikasi tentang indeks korupsi. Pupuslah sudah penegak hukum bagian paling bermasalah. Ketua DPR, DPD dan anggota DPR pusat sampai ke kabupaten banyak yang terjerat. Sebagai legislatif di sana sini, dominan partai berkuasa dan besar. Pupuslah sudah banyak yang munafik di dalamnya. Apalagi di pemerintahan, presiden belum, tapi menteri, gubernur, bupati, apalagi dinas-dinas dan lainnya di pemerintahan.

Ke semua level eksekutif trendnya tinggi dan menguak. Korupsi secara geografis, ramphan di mana-mana sampai ke desa-desa. Di sektor ekonomi, sosial politik dan agama juga bervariasi. Pelaku penyedia bribes dalam berbagai modus tentu dalam kalangan swasta, penyedia jasa kontraktor, dari berbagai jenis dan bidang. Bagi yang sudah tertangkap, mereka sekarang ada yang sadar, dan ada yang belum. Bagi yang belum tertangkap, jelas karena memang para panyidik yang bertugas di KPK, sangat terbatas.

Model pengawasan internal, mulai inspektorat, BPK, mapun satuan pengawasan internal, memiliki kelemahan di sana-sini. Kenapa? Karena modus dan bentuk korupsi memang masih besar dan belum ada tanda-tanda penurunan di Indonesia. Saya yakin dengan isi sebuah buku "When to Rob Bank", menyatakan sebenarnya kejahatan merampok bank secara ekonomi tidak memperoleh pengembalian. Pernyataan dalam buku itu sama dengan kondisi dalam fenomena korupsi.

Memperbaiki Daya Saing Industri (Anti) Korupsi

KPK adalah salah satu bentuk yang ideal dalam menangani korupsi di Indonesia. Tapi kita belum diberi kemudahan berpikir dan bertindak, bagaimana memperbaiki peranan